

Anies Baswedan

Naikkan Honor Tim Gubernur 14 Kali Lipat

Reporter: Larissa Huda

Editor: Suseno

Selasa, 21 November 2017 09:59 WIB

<https://metro.tempo.co/read/1035604/anies-baswedan-naikkan-honor-tim-gubernur-14-kali-lipat>



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 20 November 2017. Rapat Paripurna terkait penyampaian jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2018. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta [Anies Baswedan](#) mengatakan anggaran penyelenggaraan tugas tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) dialokasikan sebesar Rp 28,5 miliar. Alasannya, setiap orang yang bekerja untuk membantu gubernur menyusun kebijakan harus dibiayai pemerintah daerah. "Justru (kalau) dibiayai swasta, maka potensi ada konflik kepentingan menjadi tinggi karena itu sekarang kami buat transparan," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa, 21 November 2017.

Anggaran tersebut meningkat 14 kali lipat dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 yang sebelumnya hanya Rp 2,3 miliar. Dalam RKPD 2018, honorarium anggota TGUPP yang diajukan Rp 1,9 miliar. Jumlah itu diperoleh dari hitungan: enam orang x 13 bulan x Rp 24.930.000. Sedangkan honorarium Ketua TGUPP 1 orang x 13 bulan x Rp 27.900.000 yakni sebesar Rp 362,7 juta.

Baca: [Kegiatan yang Kerap Dipangkas Ahok Dianggarkan Lagi di Era Anies](#)

Dalam RAPBD 2018, honorarium anggota TGUPP Rp 19,4 miliar yang didapat dari perhitungan 60 orang x 13 bulan x Rp 24.930.000. Sedangkan honorarium Ketua TGUPP, sebanyak 14 orang x 13 bulan x Rp 27.900.000 sebesar Rp 5,07 miliar.

Honorarium anggota TGUPP itu menggunakan dasar hukum Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2015 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Sedangkan honorarium Ketua TGUPP mengacu pada peraturan serupa Nomor 83 Tahun 2013."Dengan transparan, didanai menggunakan APBD, maka jelas tidak ada ketergantungan kepada pihak luar. Anda bisa lihat nama-namanya siapa saja," ujar [Anies Baswedan](#).

Baca juga: [Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Arjuna tanpa Sabuk](#)

Balas Anies Baswedan,

Ahok Jelaskan Dari Mana Honor Tim Gubernur

Reporter: Larissa Huda

Editor: Jobpie Sugiharto

Selasa, 21 November 2017 21:49 WIB

https://metro.tempo.co/read/1035847/balas-anies-baswedan-ahok-jelaskan-dari-mana-honor-tim-gubernur?BeritaUtama&campaign=BeritaUtama_Click_1



Foto kombinasi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan.

Tempo/Dhemas Reviyanto-Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau [Ahok](#) lewat timnya membantah tudingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang

menuding semua anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan pada era Ahok menggunakan dana swasta.

"Operasional gubernur selama Pak Ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional sekda (sekretaris daerah), lima wali kota, dan satu bupati," ujar tim Ahok lewat akun Instagram resmi milik Ahok, @basukibtp, Selasa, 21 November 2017.

Menurut tim Ahok, staf Ahok tidak digaji dengan melibatkan pihak swasta, melainkan menggunakan uang operasional yang secara rutin diterima gubernur. Uang operasional itu pun tidak digunakan sepenuhnya untuk Ahok sendiri.

Ahok menjawab tuduhan Anies mengenai penggunaan dana swasta. Pembiayaan tim percepatan gubernur mencuat ketika Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2018 mencantumkan biaya Rp 28,5 miliar. Angka tersebut tergolong fantastis lantaran usulan awal yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Rp 2,3 miliar atau naik lebih dari 10 kali lipat.

Anies mengatakan, dengan dana dari pemerintah, pihaknya tidak akan bergantung pada pihak swasta, sebagaimana yang dilakukan pada era Ahok. Menurut Anies, dia akan lepas dari keterlibatan pihak swasta untuk membiayai staf gubernur dan staf yang membantu gubernur dalam mengambil keputusan.

Ahok, via timnya, juga menjelaskan uang operasional Ahok diberikan untuk kegiatan sosial di beberapa lingkungan masyarakat. Biasanya, menurut tim Ahok, uang operasional digunakan untuk menebus ijazah warga Jakarta yang tidak mampu, menyumbang kursi roda, renovasi rumah warga, serta renovasi rumah ibadah, termasuk masjid dan gereja.

"Bahkan uang itu untuk menambah honor untuk para *office boy* dan *cleaning service* yang bekerja di sekitar kantor gubernur. Setiap ada kelebihan, uang operasional pun dikembalikan ke kas daerah," tutur tim Ahok mengakhiri penjelasan kepada [Anies Baswedan](#).

Dana Operasional Rp 50 M Dikritik,

Ahok: Itu Untuk Bantuan Pendidikan dan Kesehatan

Ayunda Windyastuti Savitri - detikNews

<https://news.detik.com/berita/3049930/dana-operasional-rp-50-m-dikritik-ahok-itu-untuk-bantuan-pendidikan-dan-kesehatan>

Rabu 21 Oktober 2015, 17:18 WIB



Foto: Rachman Haryanto

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan dana operasional sebesar Rp 50 miliar yang dikritik DPRD tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan operasional. Sebagian digunakan untuk bantuan pendidikan dan kesehatan.

Dana operasional yang diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016 dikritik Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.

"Kalian masih ingat enggak dulu setiap tahun saya kembalikan Rp 3,8 miliar? Jadi dana operasional itu dibagi, ada sebagian kalau enggak salah 40 atau berapa persen kita taro di Biro KDH. Jadi ada minta bantuan, sumbangan semua itu dipakai," ujar Ahok di Hotel Sari Pan Pasific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2015).

"Kenapa uang operasional itu ada untuk bantuan-bantuan, sumbangan, beasiswa orang-orang sekolah, beliin kursi roda segala macam, termasuk menebus uang yang SPP-nya nyangkut itu semua pakai operasional. Itu untuk kepentingan masyarakat ada sumbangan, pernikahan, buat keamanan seperti buat TNI/Polri kan kita kasih makan kalau ada demo segala macam termasuk beresin Kali Ciliwung semua kamu kira miliar-miliar itu darimana duitnya? Itu uang operasional. Lalu buat kawinan kirim bunga semua dari operasional. Ada juga operasional lain-lain, saya bisa jamu orang makan, beli baju mau pameran atau bikin baju," lanjutnya.

Ahok menyebut uang itu sebagian diletakkan dalam rekening bank agar dapat tercatat setiap transaksinya. Dia juga hanya menggunakan dana operasional untuk membeli karangan bunga dan sebagainya.

"Makanya kemarin dengan KPK kita juga bahas operasional dipakai ke mana saja karena itu semua ada transkaskinya. Makanya saya tanya ada enggak kepala daerah yang taruh di bank? Hampir enggak ada," kata Ahok.

Uang operasional memang disediakan untuk kepala daerah. Namun Ahok sudah mewanti-wanti agar dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi apalagi masuk ke kantong pribadi sebab tidak terhitung pajak.

Ahok juga berpesan kepada Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki sistem dana operasional bagi setiap kepala daerah se-Indonesia. Dia menyebut alangkah lebih baik jika 10-20 persen dari dana operasional itu diperuntukkan bagi kepala daerah.

"Saya bilang ke Pak Jokowi, kalau ini enggak diperbaiki kasihan kepala daerah yang jujur. Harusnya mungkin 10-20 persen dari operasional boleh kita ambil sebagai masukan, masa gaji beda dengan BUMD. Kalau yang korup mah enggak peduli dia sekali ngemplang Rp 40-30 miliar saja bunga sudah dapat. Kasihan kepala daerah yang uangnya pas-pasan. Ini yang kita buka," terangnya.

Dia menegaskan dirinya selama ini hanya memakai dana operasional sebesar 0,1 persen. Padahal berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah, besaran biaya operasional gubernur dan wagub yang diizinkan hanya sebesar 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Bisa enggak saya enggak mau balikin duit operasional? Boleh. Terus boleh enggak kita ngambil sapa 0,15 persen? Boleh. Saya hanya ambil 0,1 pakainya. Terakhir kita turunkan jadi 0,13 ini yang kita pakai. Taufik kan ingat dulu pernah nanya anak magang dibayar transport dari mana, operasional. Itu sudah ada kelompoknya. Jadi itu yang kita lakukan," tutup Ahok.

Sebelum ini, Taufik merasa jumlah tersebut terlalu besar. Apalagi hanya diperuntukkan bagi gubernur dan wagub.

"Untuk biaya operasional gubernur dan wagub, Rp 54 miliar menurut Anda gede enggak tuh? Sebulan berarti Rp 4,5 miliar. Anda tahu enggak DPRD itu setahun gaji itu dia dua orang kan, kami 106 orang itu gajinya Rp 59 miliar setahun untuk 106 orang. Gubernur dan wagub Rp 54 miliar berdua, DPRD enggak ada dana operasional," kata Taufik di Gedung DPRD, hari ini.

Taufik menganggap meski besaran dana operasional yang diajukan itu sudah sesuai dengan PP tersebut, namun Taufik keberatan kalau dana sebesar Rp 50 miliar yang diajukan itu diperuntukkan bagi dua orang. Sebab jika dijabarkan lebih lanjut, maka dalam sebulan biaya operasional itu per orang mencapai Rp 4,5 miliar. Sedangkan per harinya mencapai Rp 150 juta.

"Begini strukturnya biaya tidak langsung Rp 24.423.000.0000.0000, biaya langsungnya hanya Rp 30 triliun. Bacaan sederhananya membelanjakan Rp 30 triliun, ongkosnya Rp 24 triliun. Dulu ini diumpetin nggak pernah dibuka, sekarang kita mau tahu duit segitu apa saja. Oh ketemulah ini," kata politisi Gerindra ini.

"Kira-kira hemat enggak tuh gubernur? Kita mau kaji kenapa bisa segede itu gitu lho. PP-nya itu bunyinya paling rendah kita kan punya APBD di atas Rp 500 miliar, paling rendah Rp 1,2 miliar maksimumnya 0,13 persen dari PAD, itu kan maksimum," lanjutnya.

Taufik meminta waktu untuk pihaknya mengkaji ulang besaran dana operasional gubernur dan wagub dalam KUA-PPAS 2016. Dia merasa besaran tersebut tidak efektif.

(aws/fdn)